

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
(Studi kasus di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur)

Rio Perdana Saputra

20120520041

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: rio.macbeth@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang masalah tentang terjadinya peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 sehingga patut dikaji bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kabupaten tulungagung. Dalam melakukan penelitian tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah, data-data yang dikumpulkan dan disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Penulis mengambil lokasi penelitian yakni di lingkungan masyarakat Kabupaten tulungagung dan kantor KPU Kabupaten Tulungagung. Adapun jenis data yang didapat yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini yakni dapat diketahui bentuk partisipasi masyarakat dalam politik yakni *electoral activity, lobbying dan contacting*. Sedangkan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam politik yakni kesadaran politik, pengetahuan politik, kontrol masyarakat dan juga sosial ekonomi, sehingga hasil-hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan kenapa adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di angka 72% menjadi 75,4% pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilu Legislatif.

ABSTRACT

This study has a background about the increased political participation of society in the legislative elections in 2014 so it should be studied how the forms of political participation of the people and also the factors that influence the political participation of the people in the Tulungagung District. In conducting the study, the authors use descriptive research using qualitative approach. The research method is descriptive research that focused on solving the problems, the data collected and compiled, described and analyzed. The author takes the research locations in the KPU office and Tulungagung District community. The type of data obtained namely primary and secondary data. Data was collected through interviews. The results of this study can be seen that the form of public participation in the electoral political activity, lobbying and contacting. While the factors that influence people's participation in the politics of political consciousness, political science, public control and also socio-economic, so that the results of such research can be a reference to why an increase in public participation in the legislative elections of 2009 in the figure 72% to 75.4% legislative elections in 2014.

Key words: Political Participation , Community , Legislative Election.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintahan baik itu Anggota Legislatif, Kepala Daerah ataupun Presiden akan melalui cara pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali dan bersifat nasional, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 15/2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi pemilu termasuk Pemilihan Umum Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU atau Bawaslu.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu juga merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan public, dan lobi. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus (Arifin, 2006: 39).

Dalam hal ini peranan yang dimaksud diantaranya pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye, serta melakukan aksi demonstrasi, menulis di media cetak, melakukan dialog, dan sebagainya. Namun

kegiatan-kegiatan ini, sudah barang tentu harus disertai oleh rasa sukarela sebagai kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik. Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat diwujudkan. Oleh karena itu, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam Pemilihan Umum Legislatif merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat (Setiadi dan Kolip, 2013: 127).

Terdapat 2 alasan yang melatar belakangi penulis mengambil tema tentang “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung”. Pertama, tingkat kehadiran Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung cukup tinggi yakni mencapai 75,4 persen. Atau sejumlah 640.399 pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat sebanyak 849.652 pemilih. Partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 juga lebih baik dari pelaksanaan Pilkada Tulungagung tahun 2013 dan Pilgub Jatim tahun 2013 yang hanya di angka 62 persen. Jika dibandingkan dengan perhelatan serupa 6 tahun lalu yakni Pemilu Legislatif tahun 2009, partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 juga tercatat lebih tinggi. Tahun 2009 lalu jumlah partisipasi pemilih hanya 72 persen (Suprihno, 2015).

Kedua, tahun 2014 merupakan tahun politik bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2014 masyarakat Kabupaten Tulungagung melaksanakan 2 agenda pemilu sekaligus yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Hal ini tentunya membuat perhatian masyarakat Kabupaten Tulungagung pada dunia politik cukup tinggi. Situasi ini akan sangat membantu penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung”.

II. KERANGKA TEORI

A. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Yuliandri, 2007: 75-76) partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut:

1. *Electoral activity*

Segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum. Termaksud dalam kegiatan ini antara lain yakni memberikan sumbangan untuk sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih dalam sebuah partai politik atas nama partai, memberikan suara dalam pemilihan umum, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan visi dan misi yang disampaikan.

2. *Lobbying*

Tindakan seseorang atau kelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan tujuan untuk memengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut menyangkut masalah-masalah tertentu yang memengaruhi kehidupan mereka.

3. *Contacting*

Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara secara langsung (dengan mendatangi ke tempat bertugas, menghubungi lewat telepon) terhadap pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh politik baik dilakukan secara individual atau sekelompok orang yang jumlahnya sangat kecil.

B. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat

1. ***Kesadaran politik***, kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.
2. ***Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan***. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.
3. ***Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik***, kontrol

masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah *the power of directing*, juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide dan gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan.

4. ***Faktor sosial ekonomi***, Kondisi sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status dan organisasi.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah, data-data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis (Surachman, 1980: 33).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Kabupaten Tulungagung yang telah menggelar Pemilu Legislatif pada tanggal 14 april 2014 yang dalam penyelenggaraannya berhasil mencatatkan persentase yang cukup memuaskan yakni 72%. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis tentang partisipasi politik masyarakat yang berada di Kabupaten Tulungagung dan kantor yang terkait yaitu KPU setempat.

C. Unit Analisis Penelitian

Unit analisis penelitian adalah unit yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung”, untuk itu peneliti dalam penyusunan datanya mewawancarai masyarakat Kabupaten Tulungagung.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap para masyarakat Kabupaten Tulungagung yang nantinya akan digeneralisasikan sebagai penyimpulan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, pelengkap data primer serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti melalui media massa, internet, Undang-Undang serta dokumen terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan tanpa direkayasa. Observasi yang akan dilakukan peneliti berada di lingkungan masyarakat Kabupaten Tulungagung dan kantor KPUD Kabupaten Tulungagung.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data

mengenai unit analisa penelitian (Rahmawati, 2010: 33).

3. Dokumentasi

Merupakan cara mempelajari data yang mendukung penelitian yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literatur yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

F. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2012: 248) analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang logis (Agus Salim, 2006: 20).

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a) **Pengumpulan data**, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b) **Reduksi data** (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- c) **Penyajian data** (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d) **Penarikan kesimpulan dan verifikasi** (*conclusion drawing and verification*). Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur

kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus di verifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid (Salim, 2006: 22).

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014

1. Electoral Activity

Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap hal yang penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Artinya, setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai warga politik. Dalam hal ini peranan yang dimaksud di antaranya memberikan sumbangan untuk sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih dalam sebuah partai politik atas nama partai, memberikan suara dalam Pemilu Legislatif, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan visi dan misi yang disampaikan.

“Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan anggota legislatif yang akan menyampaikan aspirasi rakyat di legislatif Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang berusaha mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Dalam ikut serta dalam proses Pemilihan Umum Legislatif, sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik dan sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat” (Sudarmadi, 2015).

Keikutsertaan masyarakat Kabupaten Tulungagung cukup tinggi, seperti apa yang Bapak Suprihno sampaikan selaku Ketua KPU Kabupaten Tulungagung yakni mencapai 75,4% atau sejumlah 640.399 orang pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap yakni sebanyak 849.652 orang pemilih. Tingginya antusias ini disebabkan masyarakat dituntut untuk memilih para Calon Legislatif yang dapat dinilai dengan bagaimana mereka menyampaikan program-program ketika kampanye.

“Antusiasme masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam memberikan hak suaranya saat Pemilu Legislatif tahun 2014 cukup baik. Masyarakat mendatangi TPS pada waktu awal sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu jam 08.00 WIB sampai jam 10.00 WIB. Jadi ketika sudah lewat jam 10.00 WIB, suasana di TPS sudah mulai cukup sepi tetapi masih ada beberapa masyarakat yang mendatangi TPS untuk memberikan hak suaranya. Meskipun jam 10.00 WIB sudah mulai sepi, namun penghitungan suara tetap dilakukan setelah jam 13.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU” (H. Johan, 2015).

Dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung, masyarakat juga mengikuti kegiatan kampanye para calon anggota legislatif untuk lebih mengenal apa saja visi dan misi yang mereka paparkan kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung. Selain untuk mengetahui apa saja program-program yang dimiliki oleh para calon anggota legislatif, masyarakat juga memanfaatkan momen kampanye menjelang Pemilu Legislatif tahun 2014 untuk mendapatkan sembako, hal ini dikarenakan ketika kampanye para calon anggota legislatif tersebut berlangsung mereka juga membagi-bagikan sembako kepada masyarakat di lingkungan sekitar agar para masyarakat lebih antusias untuk mendatangi kampanye yang mereka selenggarakan.

“Ketika musim kampanye tiba, banyak dari para calon anggota legislatif yang mengajak

masyarakat untuk mendatangi kampanyenya dan membagi-bagikan sembako. Bagi-bagi sembako ini sudah menjadi hal yang lazim bagi masyarakat Tulungagung ketika akan berlangsungnya agenda Pemilu Legislatif, hal ini dikarenakan bagi-bagi sembako menjadi salah satu kegiatan kampanye yang efektif untuk mengajak masyarakat Kabupaten Tulungagung agar antusias mendatangnya” (Budi, 2015)

Dengan kegiatan kampanye tersebut di atas, intensitas tingkat partisipasi politik warga masyarakat Kabupaten Tulungagung dapat termanifestasi. Oleh karena itu, sikap-sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Tulungagung tahun 2014 merupakan parameter dalam mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik *Electoral Activity*.

2. Lobbying

Lobbying merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan biasanya berdasarkan kedekatan pribadi. Mengingat sifatnya yang informal dan bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan, kegiatan lobi biasanya dianggap sebagai kegiatan yang tidak etis. Kegiatan lobi yang menyangkut masalah politik dianggap banyak masyarakat Kabupaten Tulungagung sebuah hal yang terlarang karena dapat menyebabkan para calon anggota legislatif yang kelak terpilih menjadi tidak netral dan kurang bersih dalam menghasilkan suatu kebijakan.

“Dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung ada beberapa masyarakat berupaya untuk melobi para calon anggota legislatif, hal ini disebabkan karena posisi di DPRD sangat vital dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat-masyarakat yang mempunyai pengaruh besar mengajak duduk bersama para calon anggota legislatif untuk bernegosiasi menjelang

diselenggarakannya Pemilu Legislatif tahun 2014. Masyarakat-masyarakat yang berusaha melobi ini mayoritas mempunyai pengaruh besar di lingkungannya sehingga mampu mengajak masyarakat untuk menentukan sikap (Purwanto, 2015).

Selain untuk sebuah kepentingan, *lobbying* juga dipakai untuk mendapatkan orang-orang yang mampu memberikan hasil kemenangan dalam Pemilu Legislatif atau setidaknya memiliki target untuk mencapai sebuah hasil. Memiliki tim sukses yang diisi oleh orang-orang yang berkompeten dalam menghadapi Pemilu Legislatif merupakan sebuah harapan bagi kebanyakan calon anggota legislatif, karena dengan memiliki tim sukses yang efektif maka dengan secara otomatis kinerjanya akan bisa langsung dirasakan oleh para calon anggota legislatif. Akan tetapi untuk mendapatkan orang-orang yang berkompeten di dalam tim sukses, para calon anggota legislatif harus mampu melobi dengan baik dengan mereka. Pada dasarnya orang-orang tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam kinerja tim sukses untuk memenangi Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung.

“Untuk maju dalam sebuah Pemilu Legislatif dan memiliki target maka dibutuhkan tim sukses yang solid dan mampu memberikan sebuah gairah kemenangan terhadap setiap anggota tim, hal ini dikarenakan tim sukses memiliki pekerjaan yang cukup menguras waktu dan tenaga. Tim sukses mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan seorang Calon Legislatif untuk memenangi pemilu” (Sudarmadi, 2015).

Berkaitan dengan adanya bentuk partisipasi politik berupa *lobbying* ini melibatkan masyarakat dan calon anggota legislatif yang maju dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 diatur oleh mekanisme politik di dalam suatu sistem politik, semua ditujukan untuk tercapainya sebuah output, yaitu tujuan bersama yang telah ditetapkan, dalam hal ini

adanya penggunaan kekuasaan agar tujuan tersebut dapat terlaksana. Perlu untuk dipahami oleh masyarakat bahwa tujuan yang telah ditentukan tersebut merupakan tujuan publik dan bukannya tujuan individu.

3. *Contacting*

Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2014 juga dapat dipengaruhi oleh sebuah kelompok atau organisasi. Kelompok atau organisasi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan di DPRD Kabupaten Tulungagung jika calon anggota Legislatif yang mereka dukung menang dalam Pemilu Legislatif, kelompok kepentingan ini bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melakukan tindakan-tindakan politik namun mereka bukan kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan politik dari partai tertentu.

“Ketika menjelang diselenggarakannya Pemilu Legislatif tahun 2014 ada beberapa masyarakat yang mendatangi ke rumah saya untuk menyampaikan aspirasinya dan memberikan alasan kenapa saya harus menerima aspirasinya, setelah kampanye berlangsung pun masyarakat juga masih ada yang melakukan kontak dengan saya entah itu karena pro dengan program-program saya selama kampanye maupun masyarakat yang kurang setuju dengan program yang saya sampaikan” (Sukarman, 2015)

Kontak langsung dengan calon anggota legislatif Kabupaten Tulungagung sebenarnya juga merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membentuk sebuah produk politik. Produk politik ini merupakan kebijakan publik yang dihasilkan melalui mekanisme politik yang telah disepakati antara masyarakat yang melakukan kontak langsung dengan calon anggota legislatif dan telah disepakati bersama. Adapun mekanisme dalam melakukan kontak tersebut dengan cara penerapan sistem politik yang diberlakukan dalam struktur politik, artinya bisa melalui musyawarah.

“Saat melakukan kontak politik dengan calon anggota legislatif, saya disini memberikan masukan-masukan kepada mereka. Karena dengan berdiskusi dan memberikan masukan untuk program-program yang sekiranya untuk masyarakat Kabupaten Tulungagung saya setidaknya mampu memberikan kontribusi berupa ide-ide, kebetulan saya dekat dengan beberapa calon anggota legislatif yang maju dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Jadi tidak jarang mereka meminta nasehat dan masukan bagaimana baiknya untuk membuat program-program yang sekiranya bisa membantu banyak masyarakat” (Sudarmadi, 2015)

Dengan terbukanya para calon anggota legislatif dalam menerima masukan-masukan dari pihak yang dinilai dapat membantu itu akan semakin memudahkan calon tersebut untuk menentukan program-program yang sekiranya mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tulungagung, hal ini juga tentunya merupakan sebuah keuntungan ketika masyarakat bekerjasama dengan calon legislatif dalam mendiskusikan sebuah program walaupun ada kemungkinan diterima atau tidaknya gagasan tersebut namun paling tidak calon yang bisa menerima pendapat orang lain pastinya akan mendapat simpati dari pemilih dibandingkan dengan calon anggota legislatif yang memiliki sifat arogan dan acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kabupaten

Tulungagung pada pemilihan umum legislatif tahun 2014

1. Kesadaran Politik

Kesadaran politik masyarakat Kabupaten Tulungagung menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik yang seperti ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

“Antusias masyarakat Kabupaten Tulungagung yang cukup tinggi ini disebabkan semakin pahamnya masyarakat dengan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, saya sebagai warga Negara yang baik mencoba memanfaatkan momen Pemilu Legislatif ini untuk memberikan suara saya dengan sesuai hati nurani karena kesempatan ini hanya datang 5 tahun sekali” (Budi, 2015)

Politik uang sebenarnya sudah menjadi budaya dalam masyarakat kita hampir di setiap Pemilu, namun sekarang para masyarakat sudah pandai memilah-milah mana calon yang benar mewakili kepentingan masyarakat banyak dan mana calon yang hanya mementingkan urusan pribadi maupun kelompoknya. Hal ini bisa dilihat dari wawancara dari salah seorang narasumber yang mengatakan bahwa warga yang mendapat uang dan diminta untuk memilih mengaku tidak memberikan suaranya kepada mereka walaupun mereka diberi uang dan diminta untuk memberikan hak suaranya kepada mereka.

“Pada saat Pemilu Legislatif di Kabuten Tulungagung tahun 2014 yang berlangsung, rakyat kecil banyak yang menjadi sasaran politik uang untuk diminta memberikan hak suaranya pada calon tertentu. Ada banyak dari masyarakat Kabupaten Tulungagung yang menerima uangnya namun tidak memilih orangnya, padahal sudah jelas-jelas di lingkungan mereka tinggal ada spanduk besar yang isinya “Terima Uangnya, Jangan Pilih Orangnya”. Namun tetap saja para tim sukses dari calon legislatif yang maju dalam pemilu tersebut nekat melakukan praktek politik uang di lingkungan tersebut” (Purwanto, 2015).

Hal-hal tersebut itulah yang sebenarnya merusak citra demokrasi dalam Pemilu Legislatif, karena jika praktek seperti itu tetap dilakukan dan masyarakat Kabupaten

Tulungagung tidak pandai memilah-milah calon yang akan mereka pilih bukan tidak mungkin para anggota legislatif Kabupaten Tulungagung akan diisi oleh orang-orang yang mempunyai dana banyak saja. Dengan terpilihnya mereka menjadi anggota legislatif dengan cara-cara seperti itu maka tentu saja mereka akan mencari cara utuk bagaimana mengembalikan modal ketika masa kampanye yang telah mengeluarkan banyak uang karena praktek politik uang tersebut.

2. Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil, karena jika masyarakat tau bagaimana cara anggota legislatif tersebut dalam membuat suatu kebijakan itu akan membuat partisipasi masyarakat semakin tinggi dan lebih antusias. Program-program yang berbeda dari setiap Calon legislatif juga mempengaruhi siapa-siapa saja yang tertarik dengan program tersebut.

“Masyarakat seperti saya yang mempunyai profesi sebagai penarik becak cenderung memilih calon anggota legislatif yang mempunyai kedekatan dengan kami, tidak sedikit dari mereka yang tiba-tiba datang di pangkalan kami beristirahat untuk sekedar ikut bergabung maupun mengajak kami diskusi masalah Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung. Walaupun sebenarnya kami tahu sebenarnya mereka ikut membaur hanya saat menjelang Pemilu Legislatif seperti ini teteapi masih ada beberapa dari calon tersebut yang benar-benar menurut kami orangnya baik dan dapat diharapkan karena sebelum-belumnya calon anggota legislatif tersebut sudah bergaul dengan kita”

Pengetahuan masyarakat memang memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan untuk siapa hak suara akan diberikan ketika berada di TPS, masyarakat yang benar-benar peduli dengan politik dan memiliki pendidikan yang cukup akan secara

serius dalam mencari tau sejak jauh hari bagaimana calon tersebut dalam menyikapi kondisi politik di daerahnya tinggal. Jika calon anggota legislatif sekiranya mampu dan peka terhadap lingkungan dalam kesehariannya hampir bisa dipastikan calon-calon tersebut memang berkompoten untuk mengikuti Pemilu. Hal tersebut tentunya sangat berbanding terbalik jika ada calon anggota legislatif yang muncul atau terlihat perannya hanya ketika menjelang Pemilu Legislatif, tentunya hal ini akan membuat masyarakat semakin mengerti siapa saja yang pantas untuk mereka pilih.

“Ada beberapa calon anggota legislatif yang muncul dan terlihat perannya hanya ketika mereka akan maju dalam Pemilu Legislatif tahun 2014, hal ini tentunya bukan menjadi hal yang bisa dijadikan pilihan. Karena yang namanya orang akan maju dalam Pemilu harus sejak jauh hari sudah mempersiapkan segala kebutuhannya, mereka juga stidaknya mempunyai kontribusi minimal di daerah tempat tinggal mereka. Bukan tiba-tiba muncul dan seolah-olah mereka ini sosok yang dekat dengan masyarakat” (Budi, 2015)

Praktek-praktek instan seperti itu rupanya belum dapat membujuk masyarakat agar memberikan hak suaranya kepada mereka, karena masyarakat lebih tau siapa saja yang benar-benar peduli dan hanya memanfaatkan prektek instan seperti turun langsung ke masyarakat dan tiba-tiba muncul padahal sebelum-sebelumnya mereka kurang peduli di lingkungan tempat calon tersebut tinggal. Dengan begitu masyarakat tentunya akan lebih memilih calon yang memang daridulu peduli atau paling tidak memberikan kontribusi di lingkungannya.

3. Kontrol Masyarakat

Kontrol masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap kebijakan publik untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik ini dapat berupa masukan (ide dan gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran

kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai sebuah produk politik yang berupa kebijakan.

“Masyarakat kabupaten Tulungagung sudah memiliki pengalaman dalam Pemilu Legislatif, belajar dari pengalaman memberikan hak suaranya pada Pemilu Legislatif tahun 2014 tersebut masyarakat sekarang lebih mampu untuk melihat apa saja yang telah Anggota Legislatif terpilih pada tahun 2009 lakukan selama 5 tahun tersebut, apakah berhasil dan sesuai dengan program-program yang telah disampaikan. Jika sekiranya itu semua kurang berjalan dengan baik bukan tidak mungkin masyarakat Kabupaten Tulungagung akan kehilangan kepercayaan pada partai tersebut” (Sudarmadi, 2015).

Pemilu Legislatif yang telah berlangsung dalam periode sebelumnya menjadi tolak ukur masyarakat dan dapat dinilai apakah keberadaan program-program yang telah disampaikan ketika Pemilu Legislatif tahun 2009 sudah terealisasi semua atau bahkan tidak ada yang terealisasi sama sekali. Hal ini yang pada akhirnya akan menjadi tolak ukur masyarakat Kabupaten Tulungagung dan menjadi baham pertimbangan ketika diselenggarakannya Pemilu Legislatif pada periode selanjutnya yakni di Pemilu Legislatif tahun 2014, sehingga partai-partai yang mengusung calon-calon tersebut pada Pemilu Legislatif tahun 2009 bisa dikatakan gagal dalam diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi di legislatif.

“Faktor kontrol masyarakat dalam partisipasi politik terhadap kebijakan yang kurang berjalan dengan baik ini juga bisa menimbulkan pihak-pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan politik tersebut sehingga para masyarakat melakukan aksi protes terhadap calon anggota legislatif yang bersangkutan maupun

memboikot untuk tidak memilih partai tersebut lagi karena telah mencalonkan seseorang yang dianggap gagal ketika sudah menjadi anggota legislatif". (H. Johan, 2015).

4. Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi merupakan faktor yang cukup memberikan pengaruh ketika Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung. Faktor sosial ekonomi dalam masyarakat Kabupaten Tulungagung ini meliputi pendapatan, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Banyak diantara masyarakat Kabupaten Tulungagung yang memberikan suaranya karena faktor sosial ekonomi., hal ini disebabkan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang berpartisipasi dalam memberikann hak suaranya tidak melakukannya dengan bijak. Masyarakat yang kondisi ekonominya serba kekurangan menggunakan momen Pemilu Legislatif tahun 2014 ini untuk memanfaatkan keadaan yakni dengan memberikan suaranya kepada calon anggota legislatif yang memberikan uang kepada mereka tanpa pikir panjang, antusias mereka terhadap pemilu sebenarnya mayoritas karena ingin mendapatkan uang dari calon anggota legislatif.

"Antusias saya terhadap Pemilu Legislatif tahun 2014 sebenarnya karena uang, karena pada saat Pemilu Legislatif selalu ada pihak-pihak yang memberikan kami uang dan di minta untuk memilih salah satu calon tertentu. Karena kondisi ekonomi saya yang kekurangan ini saya akhirnya mau menerima tawaran tersebut. Bagi saya sebenarnya Pemilu Legislatif tidak memberikan dampak apa-apa bagi kami dalam kehidupan sehari-hari, karena siapapun yang menjadi anggota Legislatif menurut saya hasilnya akan sama

Walaupun antusias masyarakat cukup tinggi ketika Pemilu Legislatif, faktor sosial ekonomi tersebut sebenarnya menjadi salah satu sebab banyaknya pemilih yang bisa dikatakan secara Cuma-Cuma. Seharusnya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagai

pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung harus pandai memilih partai politik mana yang sekiranya memberikan janji yang konkrit, atau partai politik mana yang hanya mampu memberikan mengumbar janji tanpa ada bukti. Sebenarnya banyak dari kalangan masyarakat berpendidikan tinggi yang menyesalkan akan hal ini karena partai-partai tersebut mengumbar janji-janji manis ketika berkampanye tanpa berfikir panjang ke depan, seperti ini semua sudah dirasa sesuatu yang wajib dilakukan oleh partai politik. Ini semua dilakukan oleh partai politik maupun calon anggota legislatif yang masih memiliki opini bahwa untuk merebut simpati dari masyarakat dan memenangkan pemilu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk dengan membuat janji, walaupun ada calon yang memenuhi janjinya namun tidak sedikit pula yang dianggap gagal oleh masyarakat (Purwanto, 2015).

Dengan kondisi yang seperti ini, masyarakat Kabupaten Tulungagung dituntut lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada Pemilu Legislatif periode yang berikutnya, karena pengalaman tentang janji politik dari seorang calon anggota legislatif yang program-programnya menggiurkan namun cara menyampaikannya kurang tepat atau bisa dikatakan instan itu akan mengarah tidak akan terealisasinya janji tersebut dengan berbagai alasan.

V. KESIMPULAN

Dari keseluruhan bab di muka, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung pada Pemilu Legislatif tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Electoral Activity

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 yang cukup tinggi yakni di angka 75,4% menjadi bukti bahwa masyarakat lebih antusias dalam berpolitik, masyarakat datang ke TPS pada jam-jam awal sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain antusias yang tinggi berupa ikut memberikan suara masyarakat juga banyak yang menjadi sukarelawan sebagai tim sukses.

b. *Lobbying*

Bentuk partisipasi yang berupa *lobbying* masih nampak terlihat dilihat dari perilaku masyarakat yang sering mengadakan komunikasi dengan para calon anggota legislatif, hal ini dikarenakan hanya semata-mata untuk kepentingan individu maupun kelompok.

c. *Contacting*

Kontak langsung antara masyarakat dan Calon Anggota Legislatif juga nampak terlihat di Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung, bentuk partisipasi seperti ini mirip dengan bentuk partisipasi *lobbying* namun konsepnya berbeda karena ini untuk berdiskusi masalah kebijakan dan menyangkut kepentingan bersama.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu Legislatif tahun 2014.

a. Kesadaran Politik

Tingkat kesadaran politik masyarakat sebenarnya sudah mulai terlihat dengan semakin pedulinya masyarakat terhadap siapa-siapa saja calon yang maju dalam Pemilu Legislatif, masyarakat secara serius memilah-milah siapa saja calon yang pantas terpilih menjadi anggota legislatif. Meskipun begitu masih banyak juga masyarakat yang kesadaran politiknya kurang karena tidak mendapatkan pendidikan politik dan mereka memanfaatkan politik uang.

b. Pengetahuan Masyarakat

Faktor pengetahuan masyarakat ini cenderung untuk mengerti bagaimana dan apa saja yang calon anggota legislatif dan partai tersebut lakukan untuk merealisasikan semua program-program yang telah disampaikan dalam kampanye.

c. Kontrol Masyarakat

Kontrol masyarakat meliputi aktifitas untuk selalu memantau program-program calon anggota legislatif maupun partai politik yang maju dalam Pemilu Legislatif tahun 2014,

karena pada Pemilu Legislatif pada periode sebelumnya yakni tahun 2009 sudah pasti nampak terlihat siapa saja yang berhasil dan gagal sehingga pada Pemilu Legislatif tahun 2014 masyarakat sudah mempunyai gambaran yang jelas tentang pilihannya.

d. Sosial ekonomi

Faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tulungagung juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk menentukan arah pilihannya, karena walaupun antusias yang tinggi dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 para pemilih banyak yang tidak menggunakan hak suaranya dengan bijak. Mereka memilih calon anggota legislatif yang memberikan uang kepada mereka.

B. Saran

1. Bagi masyarakat

Ketika kita sebagai masyarakat dituntut untuk menentukan pilihan ketika diselenggarakannya pemilu, seharusnya kita menggunakannya dengan bijak. Masyarakat harus pandai-pandai memilah dalam lebih mengenal tentang para calon yang maju maupun partai politik yang mereka partai. Pendidikan politik sejak dini juga merupakan hal yang penting, ini disebabkan untuk meminimalisir praktek politik uang yang menurut saya malah sudah menjadi budaya. Jika kita bisa menentukan pilihan dengan bijak maka tentunya anggapan-anggapan bahwa pemilu tidak akan merubah kehidupan akan menjadi pemilu akan membawa perubahan jika kita belajar dari pengalaman.

2. Bagi KPU

KPU Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsinya mengenai pembinaan dan sosialisasi politik kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung jauh-jauh hari sebelum pemilu berlangsung, sehingga masyarakat lebih menghargai betapa pentingnya pemilu untuk menentukan akan dibawa kemana daerah tersebut. Pelaku politik uang juga sudah sepatutnya mendapatkan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam politik*. Jakarta : Pustaka Indonesia
- Budiardjo, M. 2008. *Edisi revisi Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta : PT. Gramedia utama
KPUD Kabupaten Tulungagung
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- P. Huntington, Samuel dan Joan M. Nelson dalam Erna Yuliandari.
- Reilly Ben. 2009. *Reformasi pemilu Indonesia, dalam almanak parpol Indonesia* (API, Jakarta)
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Taira Wacana.
- Setiadi, Elly & Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana
Prenadamedia Group

Diktat dan lainnya

- Rahmawati, Dian Eka. 2010. *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Laboratorium IP UMY

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 08 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
- UU No. 15 Tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Pemilu*